



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 19 Januari 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.40 WIB s.d 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	<ol style="list-style-type: none">1. Potret dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 20102. Rencana pelaksanaan kegiatan TA 20113. Evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN TA 2011
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said, SE. MBA
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: 43 dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan beserta jajarannya

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 10.40 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, pada hari ini adalah Potret dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2010, Rencana pelaksanaan kegiatan TA 2011, dan Evaluasi kapasitas untuk melaksanakan APBN TA 2011
3. Ketua mempersilakan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinannya atas rendahnya tingkat penyerapan anggaran PHLN TA 2010 Ditjen Perkeretaapian yang hanya mencapai 52,05%.
2. Terkait tingkat serapan Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang hanya sebesar 52,05%, Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Perkeretaapian untuk mempercepat proses pelaksanaan proyek-proyek PHLN perkeretaapian ke depan.
3. Komisi V DPR RI menegaskan kembali meminta kepada Pemerintah melalui Ditjen Perkeretaapian untuk mempercepat proses audit secara menyeluruh prasarana dan sarana kereta api termasuk inventarisasi asset-asset perkeretaapian dan membuat Neraca Awal PT. KAI serta menyampaikan kepada Komisi V DPR RI sebagai bahan untuk melakukan fungsi pengawasan.
4. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melaksanakan amanat UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian terutama mengenai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional dan melakukan review terhadap ketentuan pelaksanaan perundang-undangan agar sejalan dengan semangat dan norma Undang-Undang tersebut antara lain pemisahan Operator dan Regulator termasuk diantaranya pembangunan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian.
5. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian untuk segera mengimplementasikan Perpres 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dalam upaya pengembangan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian di Indonesia.
6. Guna meningkatkan keselamatan perjalanan Kereta Api maka Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait guna melakukan penertiban bangunan liar dan asset-asset lain di jalur-jalur kereta api.
7. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk segera merealisasikan KA Bandara Soekarno Hatta guna memperlancar arus penumpang jasa angkutan udara dari dan menuju Bandara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.

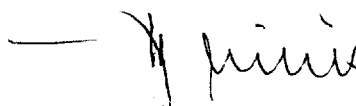
Jakarta, 19 Januari 2011

DIRJEN PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



IR. TUNDJUNG INDERAWAN, MSI

KETUA RAPAT,



H. MUHIDIN M. SAID, SE, MBA